



KEBIJAKAN PARIWISATA

Kuliah 1 - 2



Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Kebijakan & Kelembagaan Pariwisata

- Mampu menjelaskan konsep kebijakan publik
- Mampu mengklasifikasikan aspek-aspek kebijakan yang menjadi landasan dan arah pengembangan kepariwisataan di Indonesia
- Mampu mengidentifikasi berbagai kebijakan terkait kepariwisataan pada tataran nasional, provinsi, kabupaten/kota
- Mampu menjelaskan keterkaitan dan hierarki kebijakan pada tataran nasional, provinsi, kabupaten/kota
- Mampu mengaplikasikan pemahaman akan kebijakan pariwisata dalam menyelesaikan permasalahan kepariwisataan
- Mampu melakukan analisis kesenjangan kebijakan

Profil Lulusan

- Konsultan Pariwisata
- Asisten tenaga ahli bidang kepariwisataan
- Pengelola destinasi dan industri pariwisata
- Wiraswasta bidang kepariwisataan
- Peneliti bidang kepariwisataan

Tujuan Instruksional Khusus

Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang kebijakan secara umum dan kebijakan pariwisata secara khusus; mahasiswa mampu tentang teori-teori terkait kebijakan pengembangan kepariwisataan; mahasiswa mampu menjelaskan tentang kondisi umum kebijakan pengembangan kepariwisataan.

Pokok Bahasan:

- Kontrak perkuliahan
- Keterlibatan pemerintah dalam pariwisata
- Ruang lingkup politik dan kekuasaan
- Pengertian kebijakan, kebijakan publik, manajemen sektor publik
- Teori-teori terkait kebijakan pengembangan kepariwisataan



Why are government involved in tourism?

- Pemerintah mempunyai kemampuan untuk menjamin stabilitas politik, keamanan, kerangka hukum dan keuangan yang sangat dibutuhkan untuk berjalannya industri pariwisata
- Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum
- Pemerintah yang dapat bernegosiasi dan membuat perjanjian dengan pemerintahan negara lain untuk hal-hal seperti prosedur imigrasi dan ijin terbang atau mendarat di sebuah wilayah



	U. S. A.	1	1.10840	1.24170
	JAPAN	1	7.27570	8.11720
	CANADA	1	0.06480	0.07250
	INDONESIA	1000	5.36340	6.02430
	NEW ZEALAND	1	0.48450	0.70620
	VIET NAM	1000	4.83290	5.55370
			0.29640	0.43330
			7.09540	8.22790



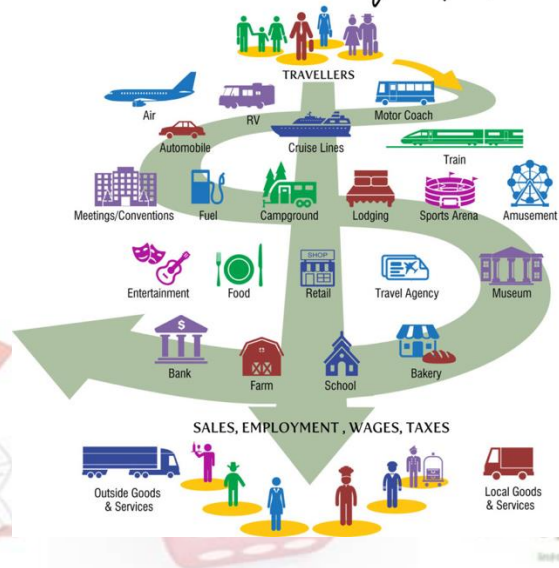
Why are government involved in tourism?

+5% **1.4 billion**
Total international tourist arrivals

+4% **USD 1.7 trillion**
Total international tourism exports
(International tourism receipts + passenger transport)

DYNAMIC CONNECTIONS

Tourism adds value every step of the way!



- Pentingnya sektor pariwisata bagi sebagian besar pemerintah negara-negara di dunia
- Pariwisata lebih dari sekedar industri dan aktivitas ekonomi, ia adalah fenomena sosial yang dinamis & universal yang mempengaruhi sebagian besar negara-negara di dunia dan masyarakatnya
- Dampak sosial ekonomi pariwisata: penghasilan, penyerapan tenaga kerja, naiknya taraf hidup



– Akibat yang dapat ditimbulkan oleh mass tourism

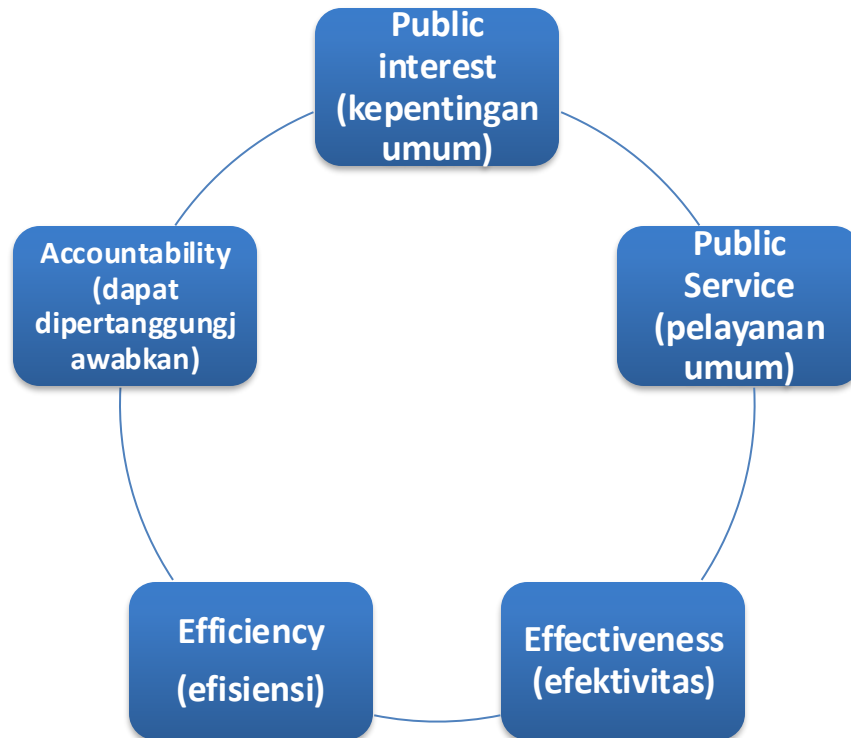
- Pemerintah terlibat dalam pariwisata juga karena masalah-masalah yang dapat ditimbulkan dari sektor pariwisata serta dampaknya yang tidak selalu baik
- Masalah-masalah sektor pariwisata, antara lain:
 - Dampak sosial, budaya dan lingkungan
 - Isu penguasaan kekayaan alam untuk golongan tertentu dan bukan untuk masyarakat secara umum
 - Persaingan usaha, dinamika pariwisata internasional maupun domestik karena berbagai situasi, misalnya: isu kesehatan, bencana alam, krisis ekonomi maupun sosial
 - Akibat yang dapat ditimbulkan oleh mass tourism

Wisatawan dilarang mengenakan hanya baju renang ketika berjalan-jalan di Kota Monaco

Wisatawan memenuhi pantai saat masa bertelur penyu sehingga mengganggu proses alam tsb



Prinsip Keterlibatan Pemerintah dalam Pariwisata



Dilema Buka Tutup atau Sistem 2-1, Puncak Tetap Penuh Sesak

Tim detikcom - detikNews

Senin, 28 Okt 2019 08:09 WIB

- 5 komentar

SHARE

a

b

~



detikcom



Kebijakan

Kebijakan(Policy) adalah suatu **kumpulan keputusan** yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan (Budiarto, 2000). **Obyek** dari ilmu politik adalah **kebijakan pemerintah**, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya (Hoogerwerf dalam Budiarto,2000)



*Budiarto, Miriam. 2000. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia. Jakarta

ASEAN
INDONESIA
2023

wonderful
indonesia

Kemenparekraf Ajukan Usulan
**Bebas Visa Kunjungan Kepada
20 Negara untuk Jalan-Jalan
#DiIndonesiaAja**

KABAR TERKINI *Parekraf* TANAH AIR

www.kemenparekraf.co.id 08118956767 KEMENTERIAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF KEMENPAREKRAF.RI KEMENPAREKRAF

Menparekraf **Sandiaga Uno** mengikuti rapat terbatas untuk membebaskan visa kunjungan bebas visa kepada 20 negara:

Australia	Rusia
China	Taiwan
India	Selandia Baru
Korea Selatan	Italia
Amerika Serikat	Spanyol
Inggris	Arab Saudi
Perancis	Qatar
Jerman	Persatuan Emirat Arab
Belanda	Negara timur tengah lain
Jepang	

Beberapa hal yang **menjadi pertimbangan:**

- **Pendapatan perkapita** negara asal wisatawan
- **Length of stay** (rata-rata lama tinggal wisatawan)
- **Average spending** per arrival (rata-rata pengeluaran wisatawan)
- Jumlah **outbound wisatawan** dari negara asal
- Kondisi **keamanan** dan **kualitas kesehatan** negara terkait



TOURISM

Buka Peluang Kolaborasi dan Investasi,
**Menparekraf Kunjungi
UEA dan Arab Saudi**



Kabar Terkini
Parekraf Tanah Air.



WWW.KEMENPAREKRAF.CO.ID



08118956767



KEMENTERIAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF



KEMENPAREKRAF RI



KEMENPAREKRAF

Menparekraf Temui Tokoh-Tokoh di

UEA & Arab Saudi

Bahas Rencana Kerjasama dan Peluang Investasi

Periode kunjungan 5-6 Januari 2024

Fokus Investasi ↓

• **IKN** Ibu Kota
Nusantara

• **KEK** Kawasan
Ekonomi
Khusus Parekraf

• **DPSP** Destinasi
Pariwisata
Super Prioritas

• **BOP** Badan
Otorita
Pariwisata

• **IPRO** Investment
Project Ready → di **Aceh**
to Offer & **Bali**



5 Elemen Utama dalam Politik menurut Jaensch (1992)



Membuat Keputusan



Kebijakan



Pembuat Keputusan

Proses Membuat
Keputusan



Pelaksanaan
Keputusan

Chapter 1: Ruang lingkup politik dan kebijakan

Hall, Colin Michael.1994.Tourism and Politics: Policy,Power, and Place.Jhon Wiley & Sons



Lasswell (1936 cited in Hall,1994:2) Politics is about power, who gets what, where, how and why.

Prof. Miriam Budiarmo menjelaskan politik adalah bermacam-macam **kegiatan** dalam **suatu sistem politik** yang menyangkut **proses menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut.**



Kekuasaan



Tujuan

Budiarmo, Miriam. 2000. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia. Jakarta
Hall, Colin Michael.1994.Tourism and Politics: Policy,Power, and Place.Jhon Wiley & Sons

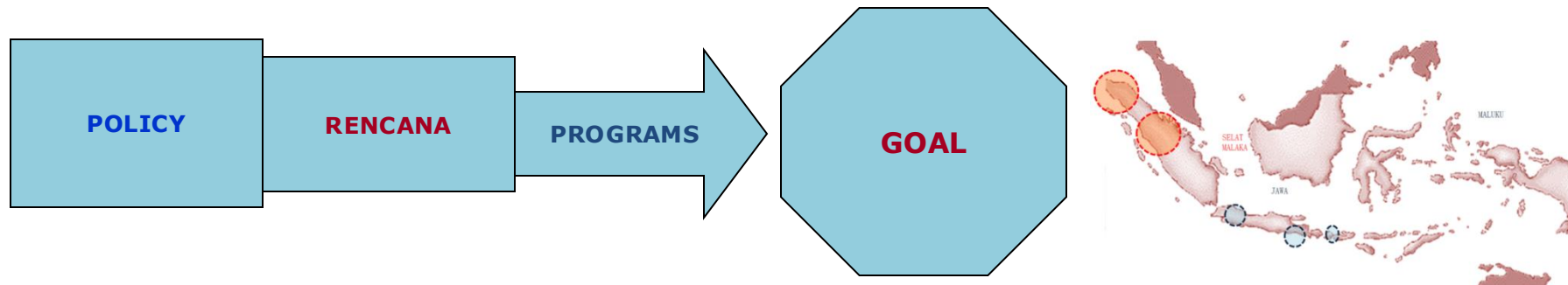
Chapter 1:Ruang lingkup politik dan kebijakan



Konsep Pokok (Ruang Lingkup) Politik menurut Roger F.Solatau (cited in Budiarjo, 2000) yaitu: Negara, Kekuasaan, Pengambilan Keputusan, Kebijakan Umum & Pembagian

Negara (State)

Ilmu politik mempelajari **negara, tujuan negara dan lembaga-lembaga** yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta negara-negara lain (Roger F.Solatau dalam Budiarjo, 2000)



Budiarjo, Miriam. 2000. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia. Jakarta

Chapter 1: Ruang lingkup politik dan kebijakan



Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Budiarjo, 2000)



Ilmu politik
memusatkan
perhatian pada
**masalah kekuasaan
dalam kehidupan
bersama** atau
masyarakat (Deliar
Noer dalam
Budiarjo, 2000)

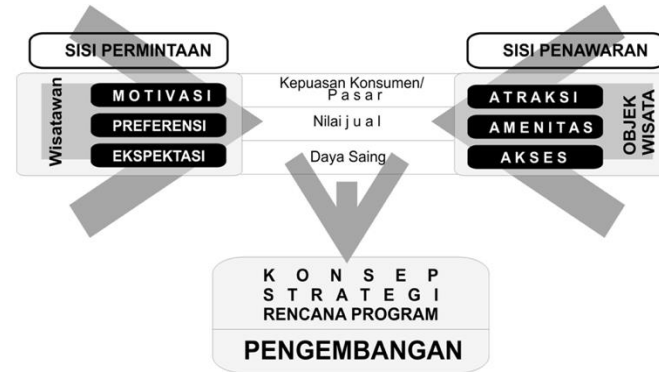
*Budiarto, Miriam. 2000. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia. Jakarta

Chapter 1: Ruang lingkup politik dan kebijakan .



Pengambilan Keputusan

Keputusan (*decision*) adalah **membuat pilihan** diantara beberapa alternatif, sedangkan istilah **pengambilan keputusan** (*decision making*) menunjuk pada **proses** yang terjadi sampai keputusan itu tercapai (Budiarto, 2000)



Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan **kebijakan umum** untuk masyarakat seluruhnya (Joyce Mitchell dalam Budiarto, 2000)

*Budiarto, Miriam. 2000. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia. Jakarta

Chapter 1: Ruang lingkup politik dan kebijakan



Pembagian (Distribution)

Pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat
(Budiarto, 2000)



Sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur **pembagian berdasarkan wewenang** untuk dan atas nama masyarakat
(David Easton dalam Budiarto, 2000)

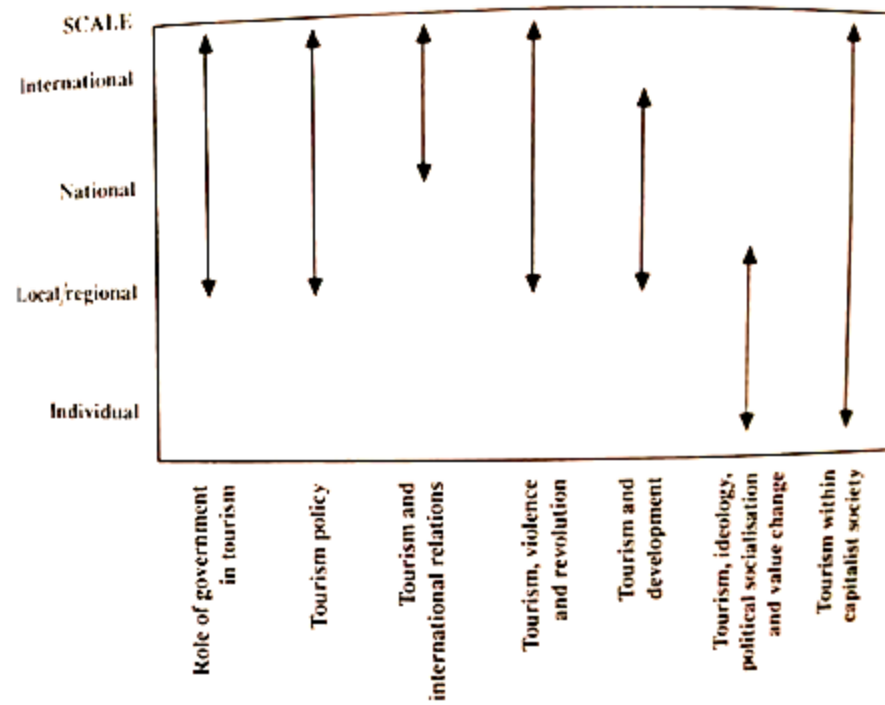
*Budiarto, Miriam. 2000. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia. Jakarta

Chapter 1: Ruang lingkup politik dan kebijakan





Dimensi politik pariwisata



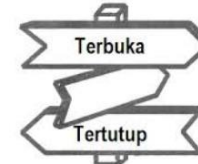
Gambar. Dimensi Politik Utama Pariwisata Colin Michael Hall (1994)

Dimensi politik pariwisata menyebar mulai dari tingkat individual hingga taraf komunitas internasional, yang melibatkan berbagai bentuk kepentingan dan stakeholder (Avenzora,2013)

- Avenzora, Ricky dan Darusman Dudung.2013.Pembangunan . Pada Kawasan Hutan ProduksiProgram Studi Pasca Sarjana IPB. Bogor.
- Collin Michael Hall. 1994.Tourism and Politics: Policy,Power and Place



IDEOLOGY



Chapter 1:Ruang lingkup politik dan kebijakan



**Pengaruh Faktor Politik Dalam Penyelenggaraan Dan
Pengelolaan Acara Pada Olympic Games**

Kategori Data	Sifat Variable yang Diukur	Interpretasi Dan Pengumpulan Data
Politik Makro	Peningkatan Image/Citra	Mengukur pengaruh penyelenggaraan kegiatan terhadap peningkatan kesadaran dan status kota/kawasan untuk tujuan komersial dan pariwisata
	Peningkatan Ideologi	Mengukur pengaruh kesadaran promosi penyelenggaraan dan dan status ideologi politik tertentu
Politik Mikro	Peningkatan Karir (Kesempatan Kerja)	Mengukur pengaruh penyelenggaraan kegiatan terhadap peningkatan kesempatan karir (kerja).
	Peningkatan Atletik	Mengukur pengaruh penyelenggaraan kegiatan terhadap kesempatan lebih besar bagi atlet lokal untuk ikut serta di dalam dan/atau belajar dari kegiatan-kegiatan

Adopt from Ritche, 1984. in Collin Michael Hall. 1994. Tourism and Politics: Policy, Power and Place

Chapter 1: Ruang lingkup politik dan kebijakan



Kategori Data - Politik Makro



Pembentukan Citra Jakarta Palembang Aman untuk dikunjungi



Memberikan makna bahwa Bhineka
Tunggal Ika masih ada di Indonesia
dan satwa asli Indonesia masih
terjaga



Variabel dalam Mengukur Dampak Politik

Kategori Data - Politik Mikro



Peningkatan Peluang Kerja



Peningkatan Prestasi Atlet



THE CORONAVIRUS CRISIS

Joy, Relief In Airports As Australia And New Zealand Open 'Travel Bubble'

April 19, 2021 · 5:45 PM ET

Heard on [All Things Considered](#)



ASHLEY WESTERMAN



2-Minute Listen

+ PLAYLIST



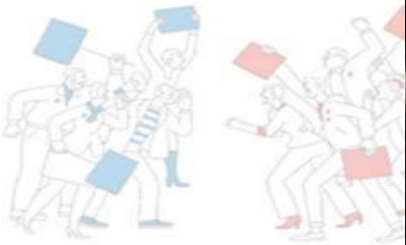
Japan's Suga defends boost for domestic tourism amid COVID-19

By Kiyoshi Takenaka, Ju-min Park

3 MIN READ



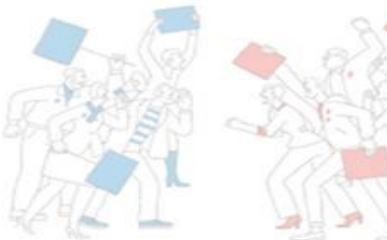
TOKYO (Reuters) - Japanese Prime Minister Yoshihide Suga defended on Friday a travel subsidy campaign that some medical groups and experts say has fuelled a third wave of coronavirus cases, and said he would finalise the size of an economic stimulus package next week.



Malaysia launches 10-year tourism plan after \$25 billion loss in 2020

By Reuters Staff

2 MIN READ



NASIONAL /

Resmi Berlaku, Masa Karantina dari Luar Negeri Bisa 1 Hari, Ini Aturannya

Rabu, 09 Maret 2022 / 08:32 WIB



BEGINI ATURANNYA...

Pemerintah memangkas masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional dari 10-14 hari menjadi 7-10 hari selama wabah coronavirus disease 2019 (Covid-19) berkecamuk.

7 HARI

KARANTINA DENGAN JANGKA WAKTU 7X24 JAM DARI NEGARA/WILAYAH ASAL KEDATANGAN SELAIN DARI NEGARA YANG MEMENUHI KRITERIA.

Bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang melakukan karantina di tempat akomodasi karantina terpusat akan mendapat pelayanan berupa:

- Penginapan
- Transportasi
- Makan
- Biaya RT-PCR

10 HARI

KARANTINA DENGAN JANGKA WAKTU 10X24 JAM DARI NEGARA/WILAYAH ASAL KEDATANGAN DENGAN KRITERIA:

- Telah mengonfirmasi transmisi komunitas varian baru SARS-CoV-2 B.1.1.529
- Secara geografis

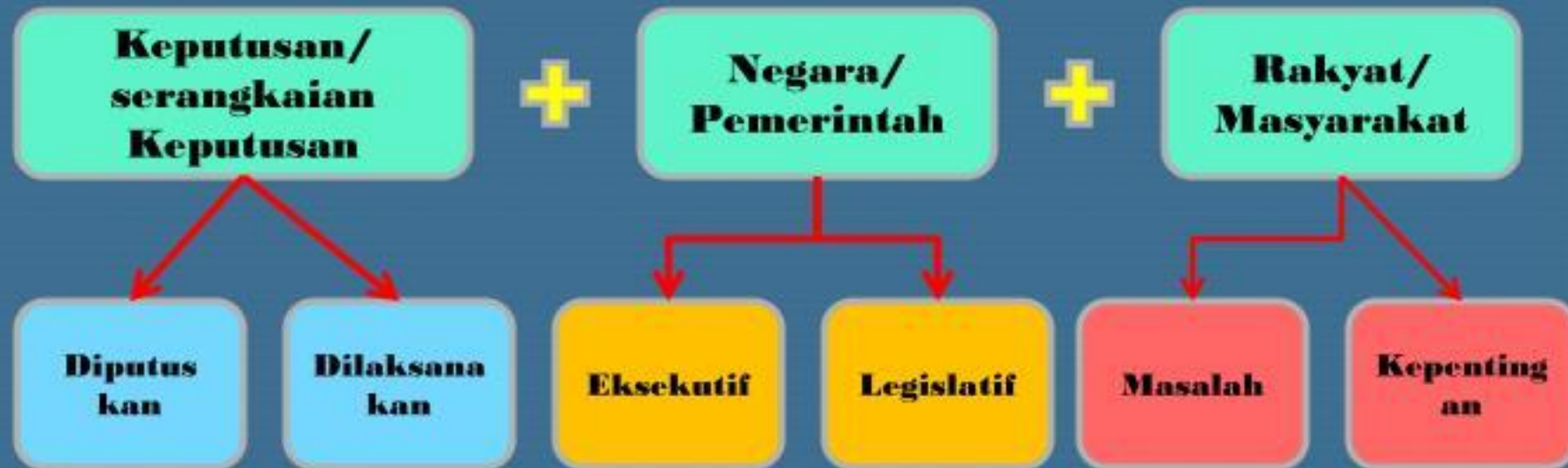
Kriteria Politik/Administrasi dalam Pengukuran Kapasitas Pariwisata

Aspek	Detail
Komponen Pengukuran	Proses perencanaan dan administrasi Biaya Efisiensi Prioritas aksi dan pengalokasian sumberdaya
Rumusan Permasalahan	Kesalahan memilih Ketidakmampuan untuk mencapai tujuan Ketidakmampuan memenuhi biaya Berubahnya prioritas
Indikator Permasalahan	Tidak tercapainya koordinasi inter-level Tolak ukur kinerja dan efisiensi

Getz, 1977 in Collin Michael Hall. 1994. Tourism and Politics: Policy, Power and Place

Chapter 1: Ruang lingkup politik dan kebijakan

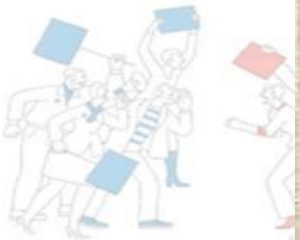




KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH:
SERANGKAIAN KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DAN TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH INSTITUSI PUBLIK (INSTANSI ATAU BADAN-BADAN PEMERINTAH) BERSAMA-SAMA DENGAN AKTOR-AKTOR ELIT POLITIK DALAM RANGKA MENYELESAIKAN PERSOALAN-PERSOALAN PUBLIK DEMI KEPENTINGAN SELURUH MASYARAKAT

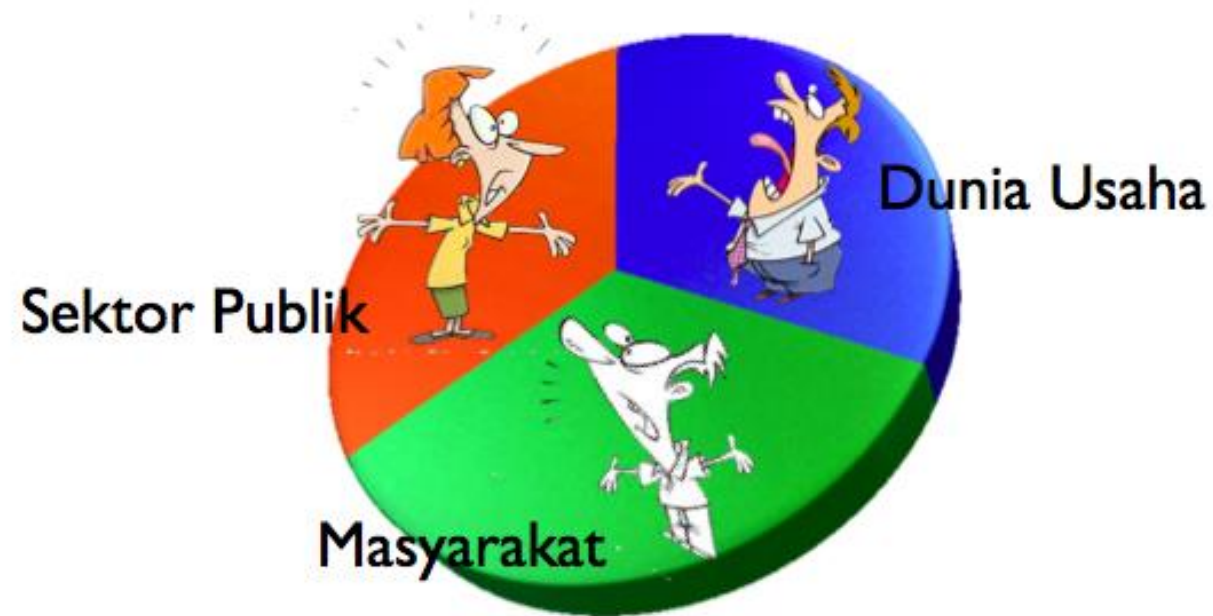
Ciri-ciri kebijakan publik yang berhasil dan baik

- A rule must be clear and easy to understand.
- People must be able to do what the rules say.
- It must not conflict with another rule.
- It must be enforceable.
- There should be a penalty for breaking it.
- It must be posted or explained to people. (You have to “give notice”)



Dimensi Pengelolaan

Masalah Tata Kelola Pembangunan Pariwisata (Komunikasi, Koordinasi, Kerja Sama)



Pelaku/stakeholders pembuat kebijakan publik

- ❑ Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.



- ❑ Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka **Governance** akan **Good**.



Pergeseran Paradigma: *From Government to Governance*

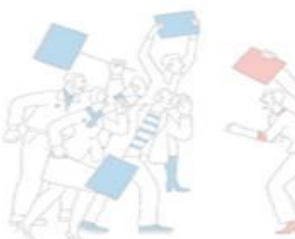


Government

- Memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
- Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Governance

- Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, *civil society* dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.



The diagram illustrates the Policy Process (Proses Politik) as a sequence of four stages, each represented by a rounded rectangle with a numbered circle (1, 2, 3, 4) in the top right corner. The stages are: 1. Isu Kebijakan (Agenda Pemerintah), 2. Formulasi Kebijakan, 3. Implementasi Kebijakan, and 4. Kinerja Kebijakan. Arrows connect the stages in a linear sequence. A large bracket above the first three stages is labeled 'Proses Politik'. A bracket above the fourth stage is labeled 'Evaluasi Kebijakan'. Below the stages, a horizontal line represents the 'Lingkungan Kebijakan' (Policy Environment), with ten upward-pointing arrows indicating its influence on the process. The labels 'Input', 'Proses', and 'Output' are positioned above the first, second, and fourth stages respectively.

Proses kebijakan publik

- 1. Proses Formulasi kebijakan
- 2. Proses Pengesahan kebijakan
- 3. Proses implementasi kebijakan
- 4. Proses Evaluasi kebijakan



Kebijakan sebagai Sebuah Proses

Proses	Keterangan
Identifikasi Permasalahan	Mengemukakan tuntutan agar pemerintah mengambil tindakan
Menata Agenda Formulasi Kebijakan	Memutuskan isu apa yang dipilih dan permasalahan apa yang hendak dikemukakan
Perumusan Proposal Kebijakan	Mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah tersebut
Legitimasi Kebijakan	Memilih satu buah proposal yang dinilai terbaik untuk kemudian mencari dukungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah hukum
Implementasi Kebijakan	Mengorganisasikan birokrasi, menyediakan pelayanan dan pembayaran, dan pengumpulan pajak
Evaluasi Kebijakan	Melakukan studi program, melaporkan output-nya, mengevaluasi pengaruh (impact) dan kelompok sasaran dan memberikan rekomendasi penyempurnaan kebijakan

Nugroho, R. 2012. Public Policy. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo

Chapter 4: Teori Kebijakan

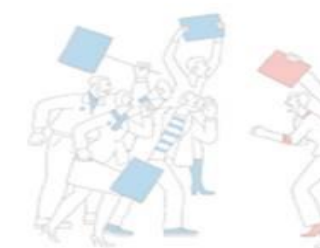
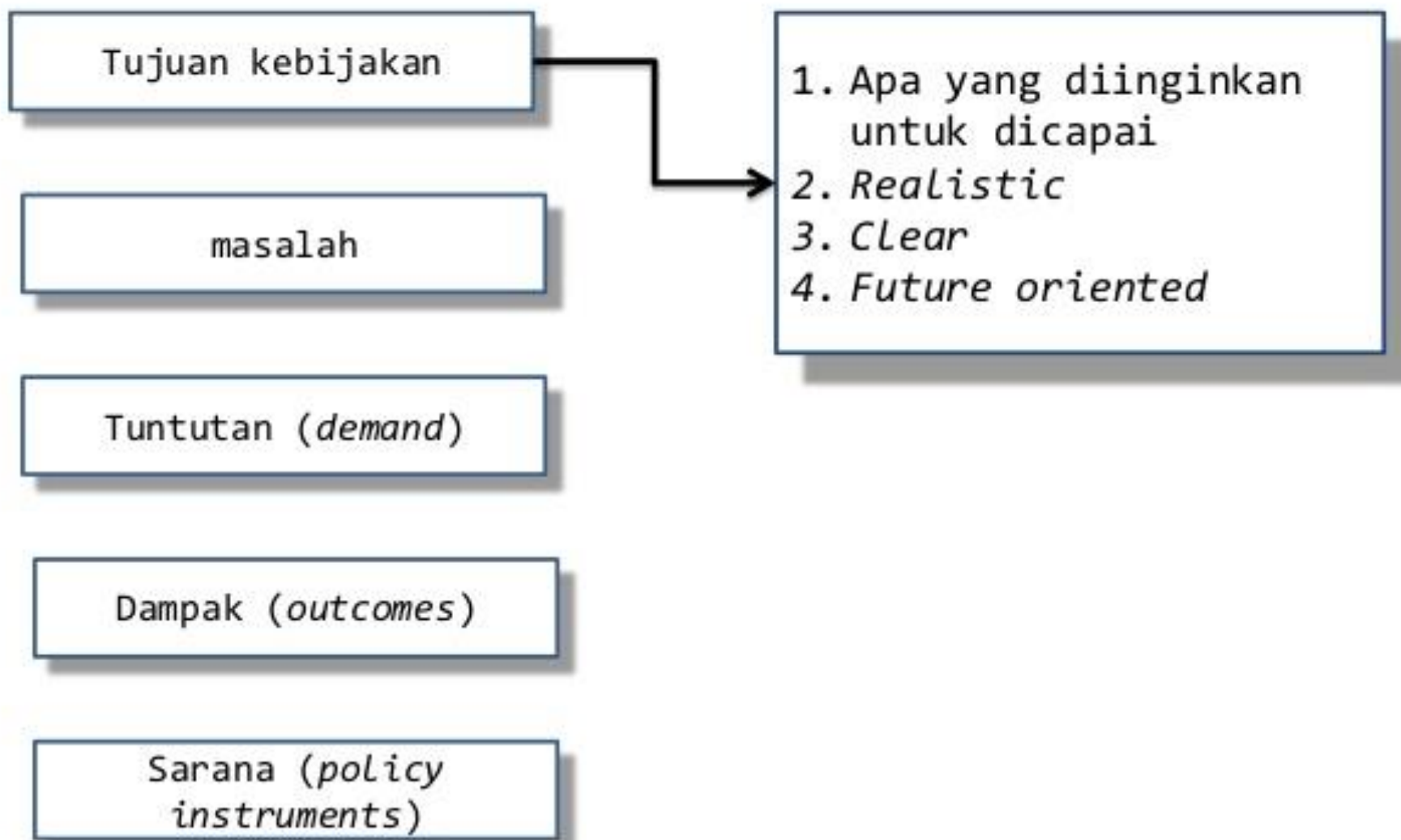


Perumusan kebijakan publik dapat dilakukan melalui beberapa tahap menurut William N. Dunn (2000:4)

- 1) **Penyusunan agenda** Pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat hendaknya menempatkan penyusunan agenda sebagai agenda bersama. Tanpa adanya penyusunan agenda bersama dikawatirkan banyak masalah yang tidak tersentuh sama sekali atau tertunda dalam waktu yang lama.
- 2) **Formulasi kebijakan** Pada tahap ini para pejabat merumuskan suatu alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.
- 3) **Adopsi kebijakan** Pada tahap ini, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- 4) **Implementasi kebijakan** Pada tahap ini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit teknis pemerintah dengan mendayagunakan sumber daya finansial dan manusia.
- 5) **Penilaian kebijakan** Pada tahap ini unit-unit pemeriksaan dalam pemerintahan menentukan apakah badan- badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.



UNSUR-UNSUR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK





Beberapa pengarang menggunakan istilah lain dari instrumen kebijakan :

- **Advocacy** - (*info instruments*)
- **Money** - (*treasury instruments*)
- **Government action** - (organisational instruments)
- **Law** - (*authority instruments*).



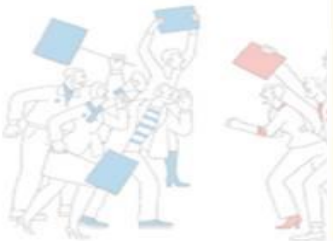
Masalah Publik & Tanggung Jawab Negara

Masalah-masalah publik:

- PKL (tempat usaha & pembinaan)
- Kemiskinan & BLT
- Kenaikan BBM
- Sarana Transportasi (Jalan Raya)
- Otonomi Daerah (kewenangan, kelembagaan, Pilkada)
- Kewenangan Desa & Keotonomiannya
- Pemanfaatan RTH
- Pendidikan (Alokasi Biaya)
- Kesehatan (Akses, biaya & keadilan)

Siapa yg
Bertanggungjawab
Menyelesaikannya....???

**Negara/ Pemerintah
bertanggungjawab
Mengintervensi
masalah2
Yg berhub. Dg
kehidupan bersama &
Kelangsungan
kehidupan bangsa**



Permasalahan Kepariwisataan Indonesia

Permasalahan yang Muncul Ke Permukaan

Rendahnya kualitas pelayanan pariwisata	Rendahnya jumlah dan nilai investasi	Ketidaksiapan sarana dan prasarana Destinasi	Pengrusakan lingkungan	
Keamanan, kebersihan dan ketertiban destinasi	Masyarakat tidak siap menjadi destinasi wisata	Lemahnya koordinasi	Peran serta a tidak pelaku usahooptimal	
Kebijakan tidak sinkron dan tidak harmonis	Citra Destinasi yang negatif	Aksesibilitas	Iklim usaha tidak kondusif	Konektivitas

Sumber Permasalahan Utama Pariwisata

Sarana dan Prasarana	SDM Pariwisata	Komunikasi dan Publikasi	Kebijakan dan Peraturan	Teknologi Informasi	Masyarakat	Investasi
----------------------	----------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	------------	-----------



CONTOH PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK DENGAN MEMPERHATIKAN UNSUR-UNSURNYA



Tujuan kebijakan

- Peningkatan citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing

Masalah

- Citra destinasi yang negatif karena hal-hal: bencana dan penanganannya, persoalan keamanan

Tuntutan (demand)

- Tuntutan dari pemerintah daerah dan swasta di dalam negeri untuk pemerintah pusat memperbaiki citra
- Kebutuhan pihak di luar negeri (calon wisatawan, tour operator, dll) untuk memperoleh informasi yang valid dan cepat tentang situasi di Indonesia

Dampak (outcomes)

- Meningkatnya citra Indonesia sebagai destinasi yang aman, nyaman, dan berdaya saing

Sarana (policy instruments)

- Instrumen informasi
- Instrumen keuangan
- Instrumen kekuasaan
- Instrumen organisasi



Instrumen informasi

- mengajak pihak swasta dan masyarakat agar menerapkan K3L dan mitigasi bencana

Instrumen keuangan

- membuat anggaran untuk sosialisasi K3L dan mitigasi bencana

Instrumen kekuasaan

- mengeluarkan peraturan yang mewajibkan daerah dan swasta untuk memiliki rencana penanggulangan krisis/bencana

Instrumen organisasi

- bagian kehumasan untuk sosialisasi penanganan krisis, memberdayakan kedutaan besar RI sebagai corong informasi



Langkah selanjutnya setelah penyusunan instrumen kebijakan

- Menentukan aktivitas/kegiatan yang akan dilakukan secara detail
- Menentukan outcome atau manfaat yang akan diperoleh oleh para pihak yang terdampak kebijakan tersebut
- Menentukan output atau luaran atau produk/barang jasa akhir



Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran, dan Indikator dengan *Logic Model*



dadang-solihin.blogspot.com

Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007

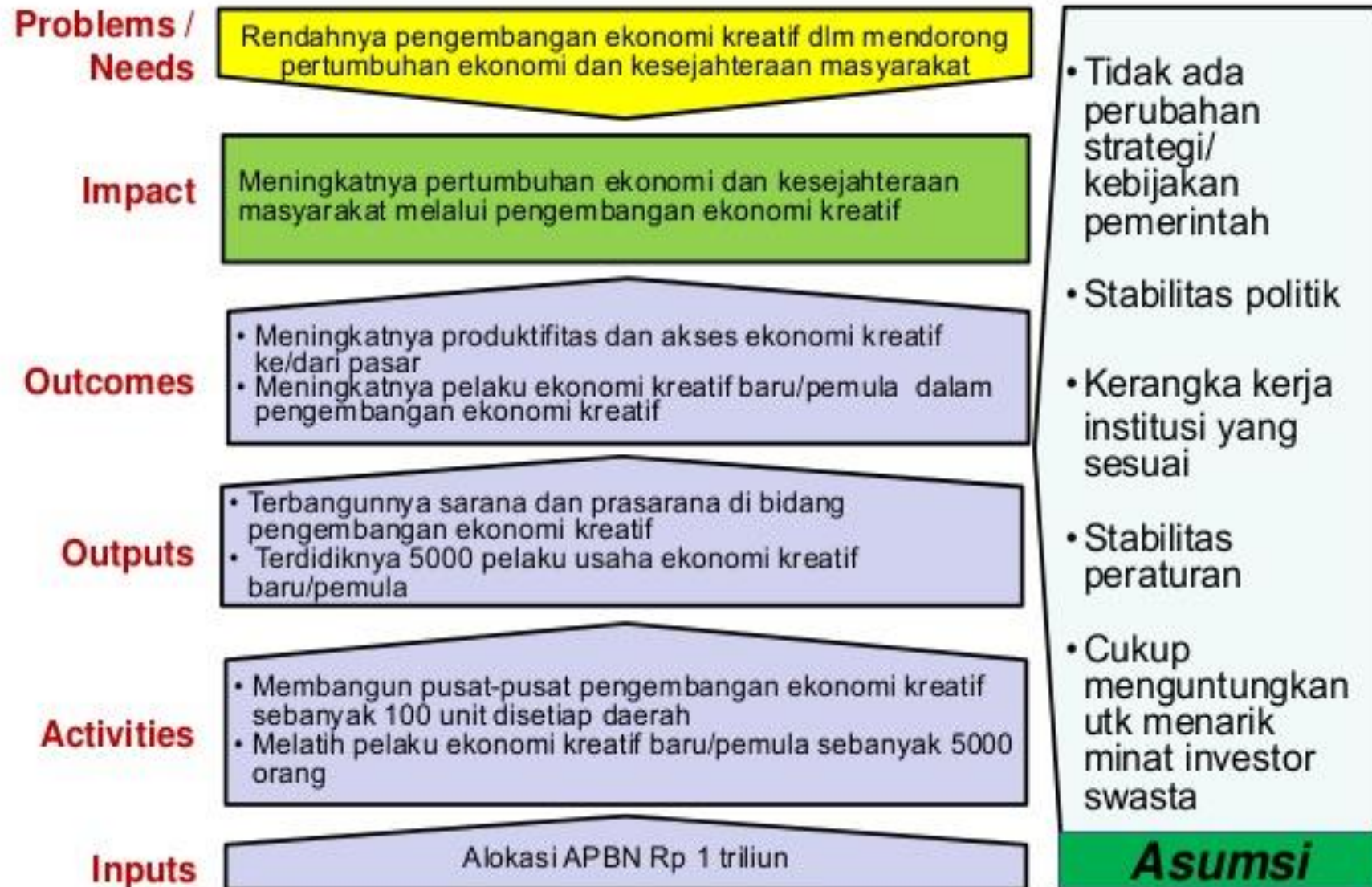
56

CONTOH PELAKSANAAN KEBIJAKAN SAMPAI DENGAN LEVEL KEGIATAN/AKTIVITAS



Penyusunan Logic Model

(Contoh: Pengembangan Ekonomi Kreatif)



Tugas Kelompok

- Cobalah susun kebijakan yang mencakup lima unsur sampai dengan penyusunan empat instrumen kebijakannya untuk mengatasi masalah-masalah kepariwisataan yang ditugaskan kepada kelompok anda
- Dikumpulkan dalam bentuk power point paling lambat Rabu, 13 April pukul 23:59
- Presentasi kelompok yang terpilih pada hari Kamis, 14 April 2022

